

KERUSUHAN MASSA, SISTEM KOMUNIKASI, DAN GEJALA SPEEDY TRIAL

Oleh Kuncara Yuniadi*)

Berbagai peristiwa kerusuhan massa yang terjadi belakangan ini sungguh menyita perhatian kita semua. Sekaligus menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Betapa tidak.

Masih segar terinventaris dalam ingatan, gejolak masyarakat dapat disebut misalnya, kasus 27 Juli 1996 (terkenal dengan Sabtu kelabu) di mana terjadi bentrokan hebat antara massa pendukung Ketua Umum PDI Soerjadi dengan Megawati hingga mengakibatkan hancurnya perkantoran, rumah, serta berbagai fasilitas umum dan sosial lainnya.

Kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur (10 Nopember 1996, penyebab awal peradilan Saleh), kerusuhan Tasikmalaya, Jawa Barat (26 Desember 1996, akibat penganiayaan ustadz oleh polisi), kerusuhan Sanggau Ledo Kalbar (kerusuhan pertama 30 Desember 1996 dan meletus lagi pada 8-9 Pebruari 1997, perkelahian pemuda lain etnis, antara suku Dayak dan Madura), kerusuhan Tanah Abang, Jakarta Pusat (27 Januari 1997, penyebabnya penertiban kakilima oleh Tramtib), kerusuhan Rengasdengklok, Karawang, Jabar (30 Pebruari 1997,

penyebabnya teguran WNI keturanan Cina terhadap sekelompok umat Islam dibulan Puasa Ramadhan), serta kasus demonstrasi karyawan Kahatex, kasus di Sumedang Jabar, di Dili Timtim, kasus PT Freeport di Irian Jaya, kasus kerusuhan di Buaran, Pekalongan (24 Maret 1997, akibat pencabutan bendera OPP) adalah kasus lainnya yang menginspirasi *warning* kepada kita agar waspada terhadap aksi serupa yang mungkin akan berulang di daerah lain.

Mengapa kejadian tragis tersebut seakan terus berulang di bumi Pancasila dan bagaimana upayanya agar kejadian tersebut tidak akan terulang kembali atau paling tidak diminimalisasi hingga tidak sampai mengganggu dan mengancam ketenangan dan rasa aman warga setempat serta terbebas dari rasa takut terhadap keberingasan (*fear of crowd*).

Tulisan berikut mencoba menelusuri akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan kerusuhan tersebut melalui sudut pandang komunikasi.

Pada titik ini, penulis tertarik dengan pendapat seorang pakar dalam menanggapi aksi rusuh yang terjadi akhir-akhir ini. Psikolog dan pengamat sosial Sartono Mukadis

*) Penulis adalah Kanit Dokumen Forensik, Labfor Polri Cabang Medan.

pernah mengemukakan analisisnya mengenai fenomena keberingasan massa yang terjadi akhir-akhir ini. Antara lain ia menyatakan, berbagai peristiwa keberingasan massa yang terjadi belakangan merupakan akibat mampatnya komunikasi yang pada gilirannya menyebabkan tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat. Keresahan yang tak mendapat penyaluran ini membuat orang mudah meledek bahkan dengan pemicu sekecil apapun.

Terlepas benar tidaknya pendapat demikian, dan apabila kita lacak dalam tataran kejadian beruntun itu maka dapatlah kita mengerti bahwa saat ini masyarakat cenderung beringas jika ada keadaan yang membuatnya terdesak. Keterdesakan ini bisa spontan dan sesaat (insidental) maupun cenderung brutal dan bersifat berantai.

Keberingasan massa menunjukkan massa pengeroyok memang belum sadar sepenuhnya terhadap tegaknya hukum. Dengan kata lain, sebenarnya masyarakat memang masih buta hukum. Di sisi lain, pihak yang mestinya tahu hukum dan menjunjung tinggi kaidah hukum dan bagaimana harus menerapkannya kadang-kadang seringkali tergelincir terhadap aturan hukum sendiri. Main hakim sendiri tidak hanya monopoli masyarakat awam semata melainkan pihak pemangku keadilan, kalaulah memang bisa dikatakan demikian, bertindak main kekuasaan (*show of*

force) sehingga melukai masyarakat awam yang jujur dan pendamba keadilan.

Solidaritas, setia kawan dan apapun namanya, yang timbul akibat fenomena ketimpangan semacam itu, bukan lagi didasarkan oleh aspek kebenaran dan keadilan malah diselewengkan ke arah solidaritas berdasar *like and dislike* dan kepentingan kelompok atau golongannya sendiri yang bertujuan jangka pendek.

Jadi, solidaritas yang berkembang lama makin lama bagaikan bola salju adalah solidaritas semu. Contohnya tawuran antarpelajar STM dan SMA dan meningkat menjadi tawuran antarmahasiswa di Jakarta dan Ujung Pandang, tawuran antar-RW di kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, pengeroyokan wartawan di Kerinci, Jambi dan tewasnya wartawan Udin di Yogyakarta dan beberapa contoh di awal tulisan ini, barangkali menjadi berita fakta aktual di jagad ini.

Jika kerusuhan massa dilakukan oleh suku primitif, bisa dimengerti. Bisa jadi merupakan perang antar suku. Tetapi jika ini terjadi di kota-kota besar, dengan tingkat kehidupan yang lebih mapan (sosial, ekonomi, dan politis), tingkat pendidikan yang lebih tinggi (berfikir secara rasional bukan emosional), aturan hukum relatif lebih representatif dan komprehensif serta banyak kelebihan dan nilai plus lainnya, jelas dan transparan serta daerah tidak terisolisir (hing-

ga komunikasi menjadi lebih lancar), jelaslah bahwa gejala dan gejolak ini mengidentifikasi menunjukkan ada sesuatu yang lain (baca : ada *something wrong*-nya), dan bukan sikap yang biasa (ditunjukkan oleh bangsa Indonesia yang toleran (saling menghargai), musyawarah-mufakat (jika timbul konflik untuk menemukan jalan keluar demi kepentingan bersama), kekeluargaan (bukan atas dasar saling membenci dan permusuhan), tenggang rasa (menghargai perasaan orang lain), dan Pancasila).

Ini tentunya sangat mencemaskan, untuk tidak mengatakan menggenaskan. Dalam konteks mencari akar permasalahan sudah semestinya semua pihak tanpa kecuali perlu mawas diri, introspeksi. Dalam sudut pandang sistem budaya komunikasi, tentunya bisa diprediksi ada kerancuan bahkan kamuflase dalam sistem komunikasi. Terutama sistem informasi. Masyarakat sedang bimbang (baca : tak percaya) pada apa pun.

Ada semacam kebingungan mengenai sumber informasi mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang harus dipercaya dan mana yang tak bisa dipercaya. Berita resmi kadang-kadang tidak memuaskan masyarakat yang boleh jadi sudah lebih dulu tahu beritanya, sehingga mereka mengandalkan berita atau isu-isu yang sering dan sedang beredar di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat.

Dan sumber informasi resmi

hanya bersifat dari atas ke bawah (*top down*) dan *one way communication*, bukan komunikasi dua arah timbal balik (*two way communication*).

Sementara media massa yang salah satu perannya adalah ikut menceerdaskan kehidupan bangsa, netral dan tidak berpihak, saat ini justru tidak lagi bisa dijadikan sebagai tempat bertanya, ajang dialog guna mencari kebenaran dan brainstorming hingga sebagian masyarakat cenderung beralih haluan kepada rumor, bisik-bisik maupun isu-isu yang justru malah menyesatkan apalagi ada pihak pengipas hingga masalah menjadi semakin kompleks, penuh ketegangan dan suhu konflik tinggi.

Kondisi ini jelas rawan dan mengandung titik-titik kelemahan terhadap pengaruh instabilitas emosional dan menyebabkan terbentuknya kelompok masyarakat yang hanya percaya pada kabar burung yang ia terima dari sekelilingnya (hingga sangat sumir) dan mudah diikat oleh ikatan yang sangat irasional. Misalnya, mudah diajak untuk tidak percaya dan memusuhi orang hingga pengaruhnya yang berjalan terus menerus bisa menambah barisan kebencian.

Sementara tokoh-tokoh formal tidak berakar dan sanggup memenuhi amanah demi kepentingan dan kemashalatan masyarakat luas karena tertutup kesibukan jabatan. Sedang tokoh informal terlanjur menengadahkan ke atas dan lupa menoleh ke bawah

karena terenggut dan terlanjur ke-
enakan sehingga tidak berakar lagi.

Jika kondisi seperti ini terus ber-
langsung maka dikhawatirkan akan
terjadi kebuntuan komunikasi dan
pada akhirnya kamampatan penalar-
an. Pertanyaan yang timbul kemudi-
an adalah masyarakat pencari dan
pendamba keadilan hendak mengadu
ke mana dan kepada siapa?

Para pakar komunikasi berpen-
dapat, saat ini terjadi kemampuan
komunikasi yang pada gilirannya ter-
jadi kemampuan aspirasi. Orang tak
diberi kebebasan untuk memilih.
Orang dimassalkan, dijadikan mono-
lit, disuruh hitam-putih. Yang besar
selalu dianggap benar, bukan ber-
dasarkan nalar. Kondisi demikian
bisa menyebabkan masyarakat resah
dan gelisah.

Keresahan ini ibarat genangan
bensin, tinggal menunggu percikan
api sudah mampu menimbulkan
kebakaran. Dan membahayakan!

Roda kehidupan masyarakat tak
ubahnya jalannya kendaraan bermot-
tor yang digunakan untuk mencapai
suatu tujuan. Pada titik ini, ibarat
mesin jika knalpot sebagai saluran
asap atau sisa buangan kotoran ken-
daraan bermotor tempat (meminjam
istilah masyarakat Medan) maka
suhu knalpot akan meninggi dan
menyimpan panas yang setiap saat
mudah meledak dengan pemicu se-
kecil apapun!

Di sisi lain, tidak ada sarana yang

ampuh untuk menyalurkan aspirasi.
Aspirasi tak disalurkan secara semes-
tinya, cuma ditampung. Orang jadi
terdorong menuntut hak dan lupa
kewajiban. Orang tak dilatih untuk
bertanya dan berdialog. Apalagi ber-
debat. Padahal ada masalah harus di-
tanyakan, diselesaikan dan dicari
jalan keluarnya. Jadi orang bisa ber-
tanya dan berdialog (bukan monolog,
satu arah). Berdebat dan saling
memberikan argumentasi, bukanlah
suatu hal yang tabu. Hal ini telah di-
jamin dalam suatu negara demokrasi
yang berdasar Pancasila dan UUD
1945. Saling menghargai perbedaan
pendapat orang lain.

Akhirnya, orang cenderung
menggunakan otot (fisik) dan emosi-
onal daripada otak (akal) yang rasi-
onal dalam menyelesaikan setiap
persoalan. Konsepsi budaya musya-
warah untuk mufakat yang dibangga-
banggakan selama ini telah dianggap
sebagai angin lalu (Gone With the
Wind). Akibatnya, muncullah gejala
perilaku sosial yang dinamakan
speedy trial yang menghinggapi
masing-masing individu maupun
dalam bentuk agresifitas kolektif
massa yang meyakini tindakan
kekerasan dianggap sebagai satu-
satunya cara untuk menyelesaikan
masalah (the ultimate solution for
problems) dari yang ringan hingga
berat secara lugas, cepat, tuntas dan
hasilnyapun langsung dapat diketah-
ui dibanding melalui upaya-upaya
birokrasi penegakan hukum (atau
musyawarah mufakat) yang dinilai

masih berbelit-belit, hirarkis dan diskriminatif (kaya-miskin, berpangkat-tidak, dsb).

Perilaku yang bersifat menyimpang ini terindikasi pada mental suka menerabas aturan main (*rule by law*, bukan *rule of law*), menempuh jalan pintas (*path away*) yang tentunya tidak kita kehendaki.

Untuk mengatasi keberingasan massa yang mungkin akibat dari mampatnya komunikasi, perlu ada kejujuran, ketulusan dan kemauan untuk berdialog, berkomunikasi timbal balik. Artinya komunikasi haruslah bersifat horisontal, tidak vertikal, demokratis dan memakai model penyampaian pesan dua arah (*receiver centred paradigm*). Seperti kata Luis Ramiro Beltran, haruslah tercipta iklim hubungan komunikasi (*communication relationship*) yang sehat antar individu, masyarakat dan pemerintah.

Karena komunikasi, menurut S. Muis mengutip pendapat pakar di atas, adalah proses interaksi sosial yang demokratis, didasarkan atas pertukaran pesan atau simbol. Dan semua orang mempunyai akses yang sama untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi harus berlangsung dalam bentuk dialog secara bebas, sukarela, demokratis dan egaliter. Semua orang berhak akan

sumber daya komunikasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasinya. Pemaksaan pengaruh atas perilaku orang-orang lain bukanlah utama budaya komunikasi.

Dengan kata lain, pada konteks ini dialog yang didasarkan pada kejujuran, mau mengakui kebenaran argumentasi orang lain dan demi kepentingan bersama akan memuaskan kedua belah pihak sehingga pihak ketiga (meminjam kosakata yang populer akhir-akhir ini) tidak ada kesempatan untuk main kipas apalagi menunggangi. Dan adu fisik pun atau tindakan salah lainnya bisa dihindarkan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dialog bagian dari implementasi sistem komunikasi dua arah timbal balik merupakan bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks membangun budaya komunikasi saat ini kita sudah perlu merintis untuk meninggalkan paradigma vertikal (*top down*) dengan lebih menyeimbangkan aspek horisontal (kemitraan). Kiatnya adalah, hal ini harus dimulai dari kalangan atas mengingat kita masih menganut sistem paternalistik. Barangkali inilah salah satu kuncinya.